

## MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN BERDASARKAN STANDAR NASIONAL

Hajrawati \*)

Guru SMK Negeri 1 Jeneponto

e-mail: hajrawatijeng@yahoo.co.id

**Abstract:** *The study aimed at discovering the description of the management of facilities and infrastructure of learning based on national Standard at SMKN 1 in Jeneponto. The results of the study revealed that the management of facilities and infrastructure at SMKN 1 consisted of (1) the management of facilities and infrastructure of learning, (2) The standardization of facilities and infrastructure had not been appropriate in supporting a better learning process based, and (3) the inhibiting factors of the procurement of facilities and infrastructure were lack of fund to fulfill the needs of facilities and infrastructure and limited land which could be used as a place to store the facilities to be used; whereas the supporting factors were the students and teachers which could be used as the reason to have the facilities and infrastructure as well as the funding.*

**Keywords:** *Infrastructure Management Learning Based on National Standards.*

Keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran sangat diharapkan bagi sekolah yang menginginkan siswanya mencapai prestasi yang memuaskan. Begitu pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa setiap jenis dan jenjang pendidikan harus menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dengan manajemen yang terorganisasi, teratur dan terkendali yang dilakukan pihak yang bertanggung jawab terhadap sarana dan

prasarana belajar agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien.

Sistem manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah menjadi kewenangan pihak sekolah dalam manajemen yang mencakup pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana dan prasarana di sekolah. Sekolahlah yang paling mengetahui secara pasti fasilitas yang diperlukan dalam operasional sekolah, terutama fasilitas pembelajaran untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 8 mengemukakan

standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengertian kriteria minimal menurut Pasal 1 PP No 19 tahun 2005 dijabarkan sebagai ketentuan minimal tentang jenis, ukuran, jumlah, mutu, desain, prosedur, persyaratan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan perawatan, serta pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran.

Sisworo (2006:34) mengemukakan standar sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan berfungsi sebagai acuan dasar yang bersifat nasional bagi semua pihak yang berkepentingan dalam: (1) perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana; (2) pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan pra-sarana; dan (3) pengawasan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

Secara umum standar sarana untuk SMA/MA/SMK meliputi standar ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan,

WC, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/ berolahraga.

Pentingnya fungsi sarana dan prasarana sekolah dalam pembelajaran, maka perlunya standar minimum mengenai sarana dan prasarana sekolah. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 yang isinya membahas mengenai standarisasi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/ MAK). Dimana dalam UU No. 40 Tahun 2008 mengenai kelengkapan sarana dan prasarana bahwa sebuah SMK/ MAK sekurang-kurangnya memiliki sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran umum, ruang penunjang dan ruang pembelajaran khusus.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang sesuai dengan UU. No. 40 tahun 2008 bahwa kelompok pembelajaran umum terutama dengan ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang praktik. Oleh karena itulah untuk menunjang kelengkapan sekolah guna sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2008 maka perlunya setiap sekolah melakukan standar sarana dan prasarana sekolah. Menurut Nusagama (2011: 25) bahwa standar dari prasarana merupakan hal yang penting dan selain itu setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan dan ruang praktek. Hal ini diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, yaitu SMK Negeri

1 Jeneponto bahwa dalam UU No. 40 tahun 2008 tentang standarisasi sarana prasana bahwa jumlah minimum ruang kelas adalah 60% dengan jumlah rombongan belajar dan kapasitas minimum ruang kelas adalah 32 peserta didik, sedangkan kondisi riil di lapangan jumlah minimum ruang kelas kurang dari 60% selain itu kapasitas ruang kelas dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan jumlah 45 sampai 50 peserta didik. Kemudian hasil survei pendahuluan mengenai standarisasi perpustakaan harus dilengkapi dengan sarana buku teks pelajaran di mana rasio ketersediaan 1 eksemplar/ peserta mata pelajaran bersangkutan ditambah 4 eksemplar/ mata pelajaran/ sekolah, buku panduan pendidikan rasio ketersediaan 1 eksemplar/ guru mata pelajaran bersangkutan ditambah 2 eksemplar/ mata pelajaran/ sekolah dan buku pengajaran rasio ketersediaan 75% non fiksi dan 25% fiksi dimana total buku persekolah minimum 1.500 eksemplar untuk 7-12 rombongan belajar, minimum terdiri dari 850 judul (Undang-Undang No. 40 tahun 2008). Namun kenyataan yang terjadi bahwa jumlah buku yang tersedia dalam perpustakaan sekolah tidak sesuai dengan standar, hal ini dapat dilihat bahwa buku teks pelajaran, buku panduan pendidikan permata pelajaran sangat terbatas.

Selanjutnya ruang praktikum untuk administrasi perkantoran menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2008 harus memiliki ruang mengetik atau komputer, ruang praktek kearsipan, ruang praktik mesin kantor dan ruang praktek perkantoran namun kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan UU, Akuntansi, Penjualan, Tata Busana serta Teknik

Komputer juga sangat terbatas. Melihat dari fenomena yang terjadi dalam lingkungan SMK Negeri 1 di Kabupaten Jeneponto, terdapat beberapa sarana dan prasarana sekolah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2008 mengenai standar sarana dan prasarana Sekolah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/ MAK).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana permasalahan yang sebenarnya tentang gambaran pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran jika melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan mengenai manajemen sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan standar nasional di SMK Negeri 1 Jeneponto. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana gambaran manajemen sarana dan prasarana pembelajaran, apakah sarana dan prasarana pembelajaran yang ada sudah sesuai dengan standar nasional, apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Negeri 1 Jeneponto.

Adapun fokus dalam penelitian ini diarahkan pada manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di SMKN 1 Jeneponto berdasarkan standar nasional yang meliputi manajemen sarana dan prasarana pembelajaran yang terdiri dari: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan, standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No 40 Tahun 2008 yang meliputi: lahan, bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana dan faktor pendukung dan penghambat

dalam standarisasi sarana dan prasarana dalam pembelajaran.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta melalui informasi atau data-data yang berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran SMK Negeri 1 di Jeneponto.

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 di Jeneponto. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data tersedia cukup lengkap yang menunjang penelitian ini, serta belum pernah ada yang meneliti sebelumnya tentang Manajemen Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Wakasek, Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium, Dan Pengelola Perpustakaan yang dipilih, hal ini peneliti lakukan karena peneliti yakin bahwa mereka dapat memberikan informasi yang rinci mengenai data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai gambaran manajemen sarana dan prasarana pembelajaran, gambaran mengenai sarana dan prasarana pembelajaran dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Negeri 1 Jeneponto.

### **Manajemen Sarana dan Prasarana**

### **Pembelajaran**

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi dan indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi guru maupun peserta didik untuk berada di sekolah dalam menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto merupakan tindak lanjut diterapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana Sekolah Kejuruan/ Madrasah Kejuruan (SMK/ MAK), yang mengisyaratkan bahwa SMK Negeri 1 Jeneponto wajib melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar, Agar tujuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tercapai secara efektif dan efisien diperlukan manajemen sarana dan prasarana pembelajaran.

Dari hasil penelitian di atas, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang gambaran pelaksanaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto, yakni: (a) perencanaan sarana dan prasarana, (b) pengadaan sarana dan prasarana, (c) penyimpanan sarana dan prasarana, (d) inventarisasi sarana dan prasarana, (e) pemeliharaan sarana, (f) penghapusan sarana, dan (g) pengawasan sarana dan prasarana.

Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah yang berbentuk sarana sekolah di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Keefektifan suatu perencanaan sarana dan prasarana

di SMK Negeri 1 Jeneponto dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya itu dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah dalam periode tertentu. Apabila perencanaan pengadaan sarana betul-betul sesuai dengan langkah-langkah yang akan ditempuh, berarti perencanaan sarana di sekolah betul-betul efektif. Pengadaan sarana belajar harusnya direncanakan seefektif mungkin sehingga semua pengadaan sarana sekolah itu sesuai dengan kebutuhan di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, perencanaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto dilakukan dengan membuat analisis kebutuhan pada awal tahun ajaran. Perencanaan sarana di SMK Negeri 1 Jeneponto merupakan upaya pemikiran sarana yang diperlukan di masa yang akan datang dan bagaimana pengadaannya secara sistematis, rinci dan teliti berdasarkan informasi tentang kondisi sekolah, hal tersebut disusun mulai dari pengelola yang diteruskan kepada ketua jurusan kemudian ke wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, terakhir diserahkan kepada kepala sekolah untuk menentukan sarana dan prasarana yang dirasa perlu untuk diadakan. Dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).

Berdasarkan informasi tersebut, sejalan dengan pendapat Bafadal (2008:26) bahwa Perencanaan sarana dan prasarana adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana di sekolah yaitu sebagai berikut: a) Menampung semua

usulan pengadaan sarana sekolah yang diajukan setiap unit kerja sekolah dan menginventarisasi kekurangan sarana sekolah. b) Menyusun rencana kebutuhan sarana sekolah untuk periode tertentu Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan sarana yang telah tersedia sebelumnya. c) Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. d) Memadukan rencana kebutuhan sarana dengan dana atau anggaran yang ada. e) Penetapan rencana pengadaan akhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang disusun di SMK Negeri 1 Jeneponto tidak menyesuaikan dengan Perencanaan yang dilakukan, tidak melihat kondisi sarana yang sebenarnya. Perencanaan sarana dan prasarana dibuat tidak sesuai dengan kapasitas peserta didik. Jika dilihat dengan teori yang relevan perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan dimulai dari tim unit kerja masing-masing yang bertanggung jawab langsung, kemudian diteruskan kepada atasan yang lebih berkompeten untuk memutuskan mengenai pengadaan barang, hal tersebut direncanakan dari awal tahun ajaran baru dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Proses pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan daftar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pengadaan barang tersebut tidak semua permintaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi, hal tersebut harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, artinya sarana dan prasarana yang paling mendesak untuk dipenuhi akan lebih diutamakan dalam proses pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran tidak hanya bersumber

dari RAPBS, tetapi juga bersumber dari sumbangan komite sekolah.

Hal ini tertuang dalam Gunawan (2002: 135) bahwa pengadaan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang/ benda/ jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah pada dasarnya merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Teori yang lainnya menurut Suryosubroto (2004: 116) proses pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh yaitu: Pembelian dengan biaya pemerintah 1) Pembelian dengan biaya SPP, 2) Bantuan dari BP3 dan 3) Bantuan dari masyarakat lainnya.

Merujuk pada teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh sarana pendidikan yang diperlukan guna kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. Pengadaan sarana merupakan upaya merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya, tetapi ketersediaan sarana di SMK Negeri 1 Jeneponto belum maksimal hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa ketersediaan sarana pada perpustakaan dan pada laboratorium komputer belum sesuai dengan rasio antara banyaknya siswa dengan sarana yang tersedia.

Hasil observasi dan dokumentasi terhadap pengadaan sarana menunjukkan bahwa, proses pengadaan sarana yang diadakan sesuai dengan permintaan barang oleh masing-masing penanggung jawab, baik itu dari ketua jurusan ataupun dari pengelola laboratorium.

Tetapi dalam proses pengadaan sarana tersebut kepala sekolah memberikan persetujuan jika barang yang diajukan betul-betul menjadi kebutuhan pembelajaran dan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada untuk pengalokasian sarana sekolah.

Kegiatan setelah proses pengadaan adalah penyimpanan sarana pendidikan, penyimpanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menampung hasil pengadaan barang/ alat yang belum didistribusikan atau disimpan pada tempat tertentu yang direncanakan. Penyimpanan barang menurut Gunawan (2002:39) adalah menampung/ mewartahi hasil pengadaan barang tersebut demi keamanannya, baik yang belum maupun yang akan didistribusikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyimpanan sarana dan prasarana pembelajaran diberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pengelola, tetapi dalam hal penyimpanan harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut dimulai dari pemberian kode terhadap barang yang datang, kemudian dicatat dalam daftar stok barang, dalam proses penyimpanan sarana dan prasarana tersebut, sebagai pengelola harus teliti menyimpan ditempat yang telah ditentukan agar terhindar dari kerusakan. Lebih lanjut, sesuai dengan hasil observasi dan studi dokumentasi mengenai proses penyimpanan sarana dan prasarana, dalam proses penyimpanan sarana di SMK Negeri 1 Jeneponto pengelola diberikan wewenang penuh untuk bertanggung jawab atas sarana yang telah diadakan, mereka menyimpan sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu mereka membuat catatan dan memberikan kode pada barang-barang yang ada.

Berdasarkan teori yang ada dan

data yang ditemukan mengenai proses penyimpanan sarana pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyimpanan di SMK Negeri 1 Jeneponto telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pakar di atas. Bahwa dalam proses penyimpanan barang disekolah berdasarkan prosedur, mulai dari mencatat barang yang masuk, menyimpan barang-barang ditempat yang membuat barang terhindar dari kerusakan dan disimpan ke tempat yang mudah didapat sampai pada pembuatan daftar penyimpanan barang. Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan mencatat dan menyusun daftar inventaris barang-barang milik Negara yang terdapat pada masing-masing sekolah dalam lingkungan Departemen P dan K secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi menurut Gunawan (2002:141) adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang/bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data hasil penelitian dalam proses inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Negeri 1 Jeneponto, pada bagian ini diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola untuk melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sekolah. Kegiatan inventarisasi sarana pembelajaran dilakukan mulai dari membuat daftar inventaris dan melakukan pencatatan dan pengkodean secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi dengan cara mengawasi proses inventarisasi baik itu barang yang sudah lama maupun barang yang

baru diadakan.

Kemudian data hasil observasi dan dokumentasi mengenai proses inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran, menjadi tanggung jawab pengelola, mereka membuat daftar inventaris terhadap sarana yang ada. Selain itu mereka juga tetap diawasi oleh ketua jurusan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dan kepala sekolah langsung.

Berdasarkan teori yang relevan dan data hasil penelitian, baik berupa data hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi telah dilakukan secara maksimal. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan mencatat dan menyusun daftar inventarisasi barang-barang milik instansi/unit kerja secara teratur secara tertib. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana ikut memantau jalannya proses inventarisasi di SMK Negeri 1 Jeneponto agar sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai ini akan sangat membantu terhadap kelancaran proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Data hasil penelitian yang ditemukan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto, pada proses pemeliharaan diberikan tanggung jawab kepada ketua jurusan dan pengelola dalam melakukan pengecekan secara berkala agar terhindar dari kerusakan. Selain itu dalam hal pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan prosedur yaitu dilakukan

pengecekan kerusakan barang inventaris dengan cara melakukan pengaturan agar barang dalam keadaan baik dan siap pakai. Dalam pemeliharaan barang tersebut harus disesuaikan dengan prosedur agar sesuai dengan standar kualifikasi yang berlaku.

Hasil penelitian di atas senada dengan pendapat Gunawan (2002:146) bahwa pemeliharaan adalah kegiatan rutin untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik pula. Sarana belajar yang ada di sekolah seperti perabot dan peralatan, serta media pengajaran selalu dalam kondisi siap pakai jika setiap saat digunakan. Sarana belajar bukan saja ditata dan dijaga sedemikian rupa. Dengan pemeliharaan secara teratur semua sarana di sekolah selalu enak dipandang, mudah digunakan, dan tidak cepat rusak.

Hasil observasi dan dokumentasi mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana, dalam proses pemeliharaan ini baik itu prasarana sekolah yang dirawat dengan cara mengecat ruangan atau taman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan sarana yang dilakukan oleh penanggung jawab mulai dari penanggung jawab lab sampai pada pengelola perpustakaan. Dalam hal ini ketua jurusan serta kepala sekolah juga ikut mengawasi.

Hasil penelitian dan teori di atas menunjukkan bahwa dalam proses pemeliharaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto telah dilakukan sesuai dengan prosedur, bahwa dalam proses pemeliharaan barang dilakukan pengecekan secara berkala agar terhindar dari kerusakan. Dalam proses pemeliharaan dilakukan pencegahan kerusakan barang inventaris dengan melakukan pengaturan atau pengurusan agar barang tetap dalam

keadaan baik dan jika dibutuhkan mudah dijangkau.

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga atau milik negara dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Demikian pula prosedurnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hasil penelitian dalam proses penghapusan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto dilakukan apabila sarana dan prasarana dalam hal ini barang-barang inventaris milik Negara ataupun milik sekolah sudah tidak layak pakai, maka diadakan penghapusan. Tetapi jika sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan yang masih dapat diperbaiki maka diadakan peremajaan atau perbaikan. Mengenai jangka waktu pemakaian barang itu tidak ditentukan, penghapusan dilakukan jika memang betul-betul barang-barang atau sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto sudah tidak dapat difungsikan lagi dan disesuaikan dengan prosedur penghapusan yang berlaku.

Proses kegiatan penghapusan bertujuan untuk menghapuskan barang-barang milik Negara dari daftar inventaris berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian di atas senada dengan pendapat Gunawan (2002:149) penghapusan adalah proses kegiatan untuk mengeluarkan/ menghilangkan barang-barang milik Negara dari daftar inventaris Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bafadal (2004:62)



Proses penghapusan sarana harus berdasarkan syarat-syarat dan kategori penghapusan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dalam proses penghapusan dilakukan oleh kepala sekolah, sarana yang ditiadakan apabila barang tersebut sudah tidak layak pakai lagi. Penghapusan barang inventaris milik negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepala sekolah tidak serta merta melakukan hal tersebut tanpa alasan yang kuat. Hal ini dilakukan jika barang tersebut betul-betul tidak dapat digunakan lagi maka mereka melakukan penghapusan dalam daftar inventarisasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan teori yang dikemukakan oleh pakar, maka dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan di SMK Negeri 1 Jeneponto berdasarkan syarat-syarat dan kategori penghapusan kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga atau milik negara dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sarana dan prasarana sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus harus sesuai dengan syarat-syarat penghapusan dan prosedur yang harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai pengawasan sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Negeri 1 Jeneponto, hal-hal yang perlu diawasi mulai dari tahap perencanaan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada SMK Negeri 1 Jeneponto telah dilaksanakan karena mereka memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh

terhadap sarana tersebut guna menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan sarana belajar di sekolah tersebut. Karena kemungkinan terjadi penggelapan barang inventaris sekolah sehingga perlunya monitoring kepala sekolah yang dilakukan terhadap sarana sekolah sebagai penunjang prestasi siswa.

### **Standarisasi Sarana dan Prasarana**

Standarisasi sarana dan prasarana adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait masalah peraturan mengenai sarana dan prasarana secara keseluruhan, untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam pembahasan setelah hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian, yakni SMK Negeri 1 Jeneponto yang merupakan sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Jeneponto yang memiliki lahan, bangunan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi: Kelompok ruang pembelajaran umum yang terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang lab komputer, dan kelompok ruang pembelajaran khusus meliputi: ruang praktik yang disesuaikan dengan program keahlian.

### **Lahan**

Lahan adalah area lokasi atau tanah yang akan digunakan sebagai tempat/bangunan. Berdasarkan hasil penelitian lahan yang ada di SMK Negeri 1 Jeneponto seluas 4.352 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1.778 m<sup>2</sup>, lapangan olahraga 1.000 m<sup>2</sup>, dan halaman 1.574 m<sup>2</sup>. Lahan di SMK Negeri 1 Jeneponto telah mendapatkan izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah Setempat yang digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Letak lahan yang berada di poros jalan sehingga lokasi sekolah tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya siswa.

Ketersediaan lahan yang tidak begitu luas sehingga lokasi sekolah terlihat padat karena kebanyakan dari lahan sekolah telah dibangun gedung sekolah.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 mengenai standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ketentuan lahan harus memiliki persyaratan sebagai berikut: 1) Luas lahan minimum dapat menampung sarana dan prasarana untuk melayani 3 rombongan belajar. 2) Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan praktik. 3) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. 4) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur ketera api, dan tidak memiliki potensi merusak sarana dan prasarana. 5) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara. 6) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat. 7) Status kepemilikan/ pemanfaatan hak atas tanah tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimal 20 tahun.

Merujuk pada hasil penelitian dan Peraturan Pemerintah yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa lahan yang ada di SMK Negeri 1 Jeneponto telah dibangun sesuai dengan kebutuhan.

Dengan izin pemanfaatan tanah maka lahan tersebut dibangun gedung sekolah yang terdiri dari beberapa ruang belajar dan ruang penunjang yang mendukung proses belajar mengajar. Keadaan lahan yang sempit, sehingga keadaan bangunan terlihat padat. Letak lahan sekolah berada di jalan poros yang mudah dijangkau dan dilewati oleh kendaraan umum.

### **Bangunan**

Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman sesuai dengan kebutuhan pembelajaran agar tercapai suasana belajar yang kondusif sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas. Bangunan gedung yang nyaman dan aman menjadi pertimbangan bagi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang memenuhi kriteria tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan yang ada di SMK Negeri 1 Jeneponto terdiri dari jumlah ruang belajar sebanyak 17 ruang, sementara jumlah rombongan belajar adalah 26, jadi untuk mengantisipasi kekurangan ruang belajar rombongan belajar dibagi atas 2 waktu, yakni jam pagi dan siang. Sementara bangunan lain yang dianggap perlu sudah tersedia, tetapi ada beberapa jenis ruang yang dianggap kurang, seperti ruang pembelajaran khusus yang hanya tersedia 3 ruang sementara ada 5 jurusan. Hal lain dari bangunan SMK Negeri 1 Jeneponto seperti konstruksi bangunan yang layak digunakan, ruangan memiliki ventilasi udara, bangunan dilengkapi dengan instalasi listrik, telah dilakukan pemeliharaan bangunan seperti pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 mengenai standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ketentuan bangunan harus memiliki persyaratan sebagai berikut: 1) Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis program keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program keahlian. 2) Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan. 3) Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan. 4) Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan. 5) Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. 6) Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa bangunan yang ada di SMK Negeri 1 Jenepontoterdiri dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktekbelum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana. Bangunan yang ada di SMK Negeri 1 Jeneponto sering diadakan renovasi jika dirasa perlu untuk dibe-nahi. Tetapi ada beberapa ruang yang belum ada, seperti ruang pembelajaran khusus yang belum lengkap untuk masing-masing jurusan dan ruang kelas yang belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Berdasarkan standar sarana dan prasarana mengenai kenyamanan dan kesehatan, setiap ruangan yang berada di SMK Negeri 1 Jeneponto dilengkapi dengan ventilasi.

### **Kelengkapan Sarana dan Prasarana**

#### **Kelompok Ruang Pembelajaran umum**

Ruang kelas adalah ruang yang digunakan untuk melaksanakan proses

belajar mengajar baik teori maupun praktek, dimana dalam ruangan tersebut terdapat guru maupun siswa. Standarisasi sarana dan prasarana yang terkait masalah ruang kelas di SMK Negeri 1 Jeneponto bahwa standar sarana dan prasarana ruang belajar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kapasitas per kelas dari kelas X sampai kelas XII semua jurusan menunjukkan bahwa jumlah siswa per kelasnya di atas 45 orang. Menurut informasi yang diperoleh bahwa pendaftar setiap tahunnya meningkat sementara ruang belajar belum yang tersedia tidak memadai, hal tersebut terjadi karena pejabat sekolah tersebut telah mempertimbangkan banyak hal sehingga kapasitas siswa melebihi kapasitas penampungan. Dari observasi yang dilakukan peneliti, nampak bahwa kapasitas jumlah siswa dalam satu kelas melebihi kapasitas maksimal menurut standar nasional yang berlaku. Terlihat dari semua ruang kelas baik dari jurusan akuntansi sampai pada jurusan teknik komputer dan jaringan kapasitas siswa per kelasnya rata-rata di atas 45 orang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa jumlah siswa untuk setiap kelas rata-rata berjumlah di atas 45 orang. Jika dikaitkan dengan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan ternyata jumlah siswa untuk setiap kelas di SMK Negeri 1 Jeneponto melebihi daya tampung dengan standar nasional pendidikan dengan kelas yang tersedia, yang seharusnya setiap ruang kelas maksimum menampung 32 siswa, lebih rinci data yang diperoleh menunjukkan bahwa ruang kelas yang ada di SMK Negeri 1 Jeneponto untuk setiap kelas X,

dalam setiap ruangan rata-rata terdapat 46 orang, jumlah siswa untuk kelas XI dalam ruangan kelas rata-rata 43 orang, dan untuk kelas XII dalam ruangan kelas rata-rata sebanyak 50 orang. Total rata-rata secara keseluruhan kelas adalah 47 orang. Memperhatikan jumlah siswa dalam setiap ruangan kelas yang melebihi batas maksimum dengan standarisasi Nasional yang ditetapkan.

Selanjutnya perpustakaan di SMK Negeri 1 Jeneponto jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki masih relatif kurang seperti ketersediaan meja 10 buah dan kursi yang hanya dapat menampung beberapa orang siswa saja. Kemudian koleksi buku yang tersedia masih relatif kurang dengan jumlah siswa yang ada, apalagi buku yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran, tetapi dalam hal ini pejabat yang berwenang akan membenahi secara bertahap mengenai sarana perpustakaan.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 bahwa perabot yang ada dalam ruang perpustakaan yang dimiliki oleh sekolah untuk memenuhi pelayanan belajar siswa dapat diketahui dengan membandingkan: (1) luas ruang yang standar dengan luas ruang yang dimiliki sekolah, dan (2) jumlah perabot yang terstandar dengan jumlah perabot yang dimiliki di sekolah. Dari studi observasi yang dilakukan peneliti, nampak bahwa kapasitas jumlah siswa dalam satu kelas melebihi kapasitas maksimal menurut standar nasional yang berlaku. Terlihat dari semua ruang kelas baik dari jurusan akuntansi sampai pada jurusan teknik komputer dan jaringan kapasitas siswa per kelasnya rata-rata di atas 45 orang.

Berdasarkan data tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa standar sarana dan prasarana terkait masalah ruang kelas di SMK Negeri 1 Jeneponto berdasarkan Permendiknas No 40 Tahun 2008 dinyatakan belum memenuhi standar sarana prasarana sesuai Permendiknas No 40 Tahun 2008 karena kapasitas ruang kelas maksimum adalah 32 peserta didik setiap kelas sementara di SMK Negeri 1 Jeneponto kapasitas per kelas dari kelas X sampai kelas XII semua jurusan menunjukkan jumlah siswa per kelasnya rata-rata di atas 45 orang.

Sesuai standarisasi nasional UU nomor 40 tahun 2008 ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran bidang teknologi informasi dan komunikasi, ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum setengah rombongan belajar (16 siswa). Sementara hasil penelitian mengenai ruang laboratorium komputer di SMK Negeri 1 Jeneponto terlihat belum memenuhi standar jika dilihat dari fasilitas komputer yang tersedia dengan jumlah siswa yang ada. Karena jumlah komputer yang terdapat dalam laboratorium tersebut hanya 20 unit sementara siswa yang menggunakannya dalam satu kali pertemuan berjumlah kurang lebih 45 orang, artinya satu unit komputer digunakan dua sampai tiga orang siswa secara bergantian. Namun pelaksanaan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada karena guru yang bersangkutan memiliki alternatif tersendiri dalam mengantisipasi keterbatasan komputer.

Kemudian hasil observasi dan dokumentasi ditemukan data bahwa, ketersediaan komputer dalam ruang

laboratorium masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Ruang laboratorium komputer yang dimiliki SMK Negeri 1 Jeneponto sebanyak 3 ruangan dengan luasnya 80 m<sup>2</sup> yang berkapasitas siswa 40 orang. Sementara jumlah komputer yang tersedia di dalam ruangan laboratorium komputer untuk umum hanya 20 unit komputer, sementara jumlah siswa perkelasnya di atas 45 orang, jadi dalam proses pembelajaran komputer untuk 1 unit komputer difungsikan 2 sampai 3 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan mengenai standarisasi sarana dan prasarana yakni menyangkut kelompok ruang pembelajaran umum yang terdapat di SMK Negeri 1 Jeneponto belum sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang prestasi siswa yang lebih baik. Hal tersebut dikatakan demikian karena ruang kelas melebihi kapasitas penampungan yakni jumlah siswa perkelasnya di atas 45 orang, kemudian ruang perpustakaan yang masih perlu diadakan penambahan sarana, serta ruangan laboratorium komputer yang masih perlu diadakan penambahan unit komputer.

### **Ruang pembelajaran khusus**

Ruang pembelajaran khusus adalah ruang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jurusan masing-masing. Berdasarkan data hasil, ditemukan bahwa standar sarana dan prasarana ruang pembelajaran khusus di SMK Negeri 1 Jeneponto belum lengkap, hal ini dikarenakan jumlah jurusan yang ada sebanyak 5 jurusan, sementara jumlah ruangan yang

disediakan untuk jurusan hanya 3 ruang paraktek yakni untuk jurusan akuntansi, tata busana dan teknik komputer jaringan. Sementara 2 jurusan yakni jurusan perkantoran dan penjualan tidak memiliki ruang khusus yang dapat digunakan untuk praktek. Kedua jurusan tersebut yakni jurusan perkantoran menggunakan ruang pembelajaran umum yakni ruang kelas untuk praktek dan jurusan penjualan menggunakan unit usaha langsung yang sekolah.

Berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana menurut Permendiknas No 40 Tahun 2008 kelompok ruang pembelajaran khusus, untuk sekolah menengah kejuruan harus memiliki ruang praktek khusus untuk masing-masing jurusan, ruang penyimpanan alat/ bahan praktek dan ruang instruktur harus terpisah. Ruang praktek untuk masing-masing jurusan sesuai dengan standar minimal 48 m<sup>2</sup> dan kapasitas 20 orang siswa, dengan ruang praktek yang sesuai standar minimal sangat menunjang pembelajaran pada masing-masing program keahlian.

Selanjutnya peneliti mengadakan observasi dan studi dokumentasi mengenai ruang pembelajaran khusus, terlihat bahwa dari kelima jurusan yang ada hanya 3 jurusan yang tersedia ruang pembelajaran khususnya, dan ketiga ruang yang tersedia belum memenuhi standarisasi untuk ruang pembelajaran khusus karena sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan mengenai kelengkapan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jeneponto bahwa ruang pembelajaran umum dan ruang pembelajaran khusus masih belum memadai atau tidak sesuai dengan standar sarana dan

prasarana. Dengan indikator bahwa ruang pembelajaran umum yakni ruang kelas melebihi kapasitas penampungan, jumlah siswa perkelasnya di atas 45 orang, kemudian ruang perpustakaan yang masih perlu diadakan penambahan sarana, serta ruangan laboratorium komputer yang masih perlu diadakan penambahan unit komputer. Dan ruang pembelajaran khusus yang belum lengkap, dan jurusan yang tersedia ruang pembelajaran khususnya pun belum memenuhi standar karena belum ada ruang penyimpanan dan ruang khusus untuk instruktur.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

#### **Faktor Penghambat**

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2007: 49)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh pakar di atas, maka jika dibandingkan dengan data hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian yakni di SMK Negeri 1 Jeneponto dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam manajemen

sarana dan prasarana pembelajaran yakni keterbatasan dana, sebab pengalokasian dana dari RAPBS hanya 40% dan dana dari komite sekolah yang tidak menentu jumlah dananya, sementara kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana lebih besar dari jumlah dana yang disediakan. Hal lain yang menjadi faktor penghambat adalah gedung atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan sarana yang akan diadakan, ruangan yang berada di SMK Negeri 1 Jeneponto telah difungsikan secara keseluruhan oleh karena itu menjadi suatu kendala dalam pengadaan sarana pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang relevan di atas maka dapat disimpulkan bahwa lahan adalah area lokasi yang akan digunakan sebagai bangunan. Gedung meliputi sarana dan prasarana yang menjadi tempat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sementara lahan yang ada terbatas untuk menambah ruang praktek dan sudah tidak memungkinkan untuk dibangun sebuah gedung yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Kemudian dari segi pendanaan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk pengadaan sarana yang memadai untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut menjadi suatu kendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah.

#### **Faktor Pendukung**

Secara umum, manajemen sarana dan prasarana berperan penting dalam proses belajar mengajar terutama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu keberadaan sarana dan prasarana di sekolah hendaknya dikelola dengan sungguh-sungguh agar senantiasa selalu siap pakai guna membantu tercapainya

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, sarana dan prasarana pada sekolah kejuruan memiliki ciri spesifik, yang berbeda dengan sekolah umum, terutama terkait dengan fasilitas pembelajaran praktik akuntansi, perkantoran, penjualan, tata busana dan teknik komputer dan jaringan (TKJ). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah lanjutan tingkat atas yang khas atau spesifik karena memiliki kekhususan menurut bidangnya masing-masing dan lulusannya diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil tingkat menengah. Karena sekolah kejuruan berorientasi pada keterampilan (skill) maka dalam proses pembelajarannya dibutuhkan praktik dan pelatihan yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan atas kebutuhan peserta didik di atas maka dapat di spesifikasikan mengenai Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen di SMK Negeri 1 Jeneponto, adalah ketersediaan siswa yang memadai sehingga memungkinkan untuk pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal. Selain itu dana juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengadaan sarana dan prasarana, faktor pendukung ini dapat dijadikan alasan mengapa sarana dan prasarana perlu diadakan.

## SIMPULAN

Manajemen sarana dan prasaran di SMK Negeri 1 Jeneponto telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dengan indikator bahwa: a). Perencanaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perencanaan sarana dan prasarana yang dibuat tidak disesuaikan dengan kapasitas peserta didik. b).

Pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh sarana pendidikan yang diperlukan guna kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. c). Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, bahwa dalam proses penyimpanan barang disekolah berdasarkan prosedur, mulai dari mencatat barang yang masuk, menyimpan barang-barang ketempat yang membuat barang terhindar dari kerusakan dan disimpan ketempat yang mudah didapat sampai pada pembuatan daftar penyimpanan barang. d). Proses inventarisasi telah dilakukan secara maksimal. Kegiatan inventarisasi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada yakni dengan mencatat dan menyusun daftar inventarisasi barang-barang milik instansi/unit kerja secara teratur secara tertib. e). Pemeliharaan sarana dan prasarana telah dilakukan sesuai dengan prosedur, bahwa dalam proses pemeliharaan barang dilakukan pengecekan secara berkala agar terhindar dari kerusakan. f). Penghapusan sarana dan prasarana di berdasarkan syarat-syarat dan kategori penghapusan barang-barang milik lembaga atau milik negara dari daftar inventaris dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. g). Pengawasan manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

Standarisasi sarana dan prasarana belum sesuai dalam menunjang proses pembelajaran yang lebih baik, dengan indikator bahwa: Keadaan lahan yang sempit, sehingga keadaan bangunan terlihat padat. Letak lahan sekolah berada di jalan poros yang mudah dijangkau dan dilewati oleh

kendaraan umum. Dan bangunan yang ada terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktek sampai pada ruang koperasi. Tetapi ada beberapa ruang yang belum ada, seperti ruang pembelajaran khusus yang belum lengkap untuk masing-masing jurusan dan ruang kelas yang belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Kelengkapan sarana dan prasarana masih belum memadai atau tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana.

Faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana pembelajaran dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah dana yang masih terhitung minim untuk memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana serta keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat menyimpan sarana yang akan diadakan. Kemudian faktor pendukung adalah siswa dan guru yang dijadikan sebagai alasan mengapa sarana dan prasarana tersebut perlu diadakan, lebih lanjut selain dan dijadikan sebagai faktor penghambat, juga dapat dijadikan faktor pendukung sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat diadakan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Anonim, 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Balai Pustaka
- Bafadal, Ibrahim 2008. *Perlengkapan Sekolah Teoridan Aplikasi*. Cetakan Ketiga. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan, Ary H. 2002. *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nusagama, 2011 *Standar Sarana dan Prasaran Pendidikan* Permendiknas No. 40 Tahun 2008 *tentang Standar Sarana Prasarana untuk SMK dan MAK*.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Sisworo.(2006). Standar Sarana dan Prasarana. Buletin BNSP: Media Komunikasidan Dialog Standar Pendidikan. Vol. I/No. 2 p. 33 – 37.
- Uzer Usman, Mohammad, 2001, *Menjadi Guru Profesional*, Edisi Kedua, Bandung: Remaja Rosdakarya.